

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN**

**(Studi Kasus Putusan: No. 305/Pid.B/2013/PN.PBR dan No.
60/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)**

SKRIPSI

Oleh:

AZHAR MA'RUF

201610115002



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan : No.305/Pid.B/2013 /PN.PBR dan Putusan No. 60/Pid.B/2020 /PN.Jkt.Utr.)

Nama Mahasiswa : Azhar Ma'ruf

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115002

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
NIDN. 0331017006


Dr. Rahman Amin, SH., MH
NIDN. 8802323419

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan : No.305/Pid.B/2013 /PN.PBR dan Putusan No. 60/Pid.B/2020 /PN.Jkt.Utr.)

Nama Mahasiswa : Azhar Ma'ruf

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115002

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2020

Bekasi, 22 Desember 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Lukman Hakim, SH., MH.
NIDN. 0319077606

Penguji I : Rahmat Saputra, SH., MH
NIDN. 0304058306

Penguji II : Melanie Pita Lestari, SS., MH
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantardan Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH
NIDN. 0308018202


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Azhar Ma'ruf
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115002
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 28 September
1991 Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan : No.305/Pid.B/2013/PN.PBR dan Putusan No. 60/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.)”**

adalah benar- benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Azhar Ma'ruf

NPM : 201610115002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama : Azhar Ma'ruf
NPM : 201610115002
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 28 September 1991
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Roylty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan: No.305/Pid.b/2013/Pn.Pbr Dan No. 60/Pid.b/2020/Pn.Jkt.Utr)”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan



Azhar Ma'ruf
NPM : 201610115002

ABSTRAK

Azhar Ma'ruf. 201610115002. Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan No.305/Pid.B/2013/PN.PBR dan Putusan No.60/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr).

Penulisan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang memiliki perbedaan sanksi pada setiap putusannya antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama.

Penulis dalam hal ini memiliki 2 (dua) tujuan: Pertama, untuk mengetahui Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana pidana penggelapan dalam jabatan sendiri tertuang pada Pasal 374 KUHP yang berbunyi “ *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*”. Bahwa penggelapan menurut Pasal 374 KUHP ini adalah penggelapan dengan pemberatan, Unsur-unsur memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku: a.Karena hubungan kerja pribadinya, b.Karena pekerjaannya, c.Karena mendapat imbalan uang (upah). Dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) diterangkan bahwa hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh Undang-Undang dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah sumber bahan sekunder meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif.

Hasil Penelitian dan Simpulan Penulisan Skripsi ini bahwa Pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. jika berdasarkan pada pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiil, untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur-unsur dan alat-alat bukti itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian beserta teori pidanaannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemberatan, Teori, Sanksi

ABSTRACT

Azhar Ma'ruf. 201610115002. Implementation of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Crime of Embezzlement in Position (Case Study of Decision No.305 / Pid.B / 2013 / PN.PBR and Decision No.60 / Pid.B / 2020 / PN .Jkt.Utr).

The writing of this essay discusses the implementation of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of embezzlement in positions that have different sanctions in each decision between the decisions of the First Level District Court Judges.

The author in this case has 2 (two) objectives: First, to find out how the legal rules are against the criminal act of embezzlement in a position where the crime of embezzlement in one's own position is contained in Article 374 of the Criminal Code which reads "embezzlement committed by a person in possession of goods caused by because there is a work relationship or because of his search or because he is paid for it, he shall be punished by a maximum imprisonment of five years ". That embezzlement according to Article 374 of the Criminal Code is embezzlement with weighting, the incriminating elements in question are because the criminal act of embezzlement has been committed against objects that are on the perpetrator: a. Because of his personal employment relationship, b. Because of his job, c. (wage). In the theory of proof according to the law positively (positief wettelijk bewijstheorie) it is explained that the judge is obliged to seek and find the truth, in accordance with the procedures determined by various legal means of evidence by law and secondly to find out how the implementation of criminal decisions against embezzlement in office. The author uses a normative case study research method in the form of a product of legal behavior, for example reviewing the law. The subject of the study is the law conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. Sources of legal materials used in this thesis are secondary sources of material covering various literatures and legislation, research works, works from other legal circles, the data analysis method used is qualitative analysis.

Research Results and Conclusions on the Writing of this Essay that the Court of first instance has the authority to examine the facts and evidence of a case. Examine the evidence of a case and determine the facts of the case. if based on examination in a criminal case it is to obtain material truth, to arrive at a conclusion that an element of offense has been proven or not, all facts relating to the elements and means of evidence must be considered in accordance with the law of proof along with the theory of punishment.

Keywords: *Crime, Objection, Theory, Sanctions*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasihNya yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: *Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan No.305/Pid.B/2013/PN.PBR dan Putusan No.60/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)*

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Irjen Pol (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs., S.H., M.M.**, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. **Dr. Ika Dewi Sartika Saimimah, S.H., M.H., M.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. **Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.H., M.B.A.**, selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sedekat apa pun selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif.
4. **Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Para Staf Fakultas Hukum dan seluruh civitas akademik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau semua.

7. Keluarga penulis, yaitu Ibu Sri Umi Rantun, Bapak Choirul Umam, Kakakku Mohammad Zam-Zami dan Adikku Nurul Jannah serta Istri Tercinta Winarti. Mereka yang selalu menjadi bagian hidup yang tidak pernah terhapus oleh penulis.
8. Ucapan terimakasih untuk sahabat saya Eva yuligayani, teman seperjuangan saya Faiz Fakhri dan Ade Tri Nugraha di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesan dan pesan yang mendalam selama berkuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 29 Desember 2020

Penulis



Azhar Ma'ruf

NPM : 201610115002

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ASBTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.4.1.1 Teori Pemidanaan.....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konep Negara Hukum	13
2.2 Pengertian Hukum Pidana	15

2.3 Tujuan Pidana	18
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
2.4.1 Asas-Asas Hukum Pidana dan Dalam KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana	23
2.4.2 Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	28
2.5 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	33
2.6 Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	38
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Sumber Bahan Hukum.....	42
3.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.4 Metode Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Aturan Hukum Pada Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.	45
4.2 Pelaksanaan Putusan Pada Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	52
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

MOTTO

“KEGAGALANMU ADALAH JAWABAN DARI KEBERHASILANMU
YANG TERTUNDA SAMPAI INDAH PADA WAKTUNYA NANTI”

“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT
BAGI ORANG LAIN.”

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutri)

“SESUNGGUHNYA AMAL IBADAH ITU TERGANTUNG HASIL
AKHIRNYA.”

(HR. Bukhari)



DAFTAR SINGKATAN

KUHP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
KUHAP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
KUHD	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
RI	REPUBLIK INDONESIA
UU	UNDANG-UNDANG
UUD	UNDANG-UNDANG DASAR
RUU	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
HIR	HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT
BAP	BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PN	PENGADILAN NEGERI



DAFTAR TABEL/BAGAN

Bagan 1.1 Data Putusan Pengadilan Negeri Tentang Seseorang Melakukan
Penggelapan Dalam Jabatan

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Putusan Pengadilan Negeri
- Lampiran II : Lembar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- Lampiran III : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I dan II
- Lampiran IV : Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi I dan II
- Lampiran V : Lembar Riwayat Hidup Penulis

